

BAB IV

PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Dalam meningkatkan ekonomi pembangunan di Indonesia, pemerintah memiliki program kerja yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pertumbuhan pembangunan ekonomi Indonesia pada periode 2004-2012 dapat dikatakan terjaga dengan stabil. Stabilitas moneter juga tetap terjaga dengan tingkat inflasi yang cenderung menurun. Secara nominal pendapatan pada APBN 2012 meningkat tiga kali lipat dibandingkan dengan realisasi APBN 2004 pada peningkatan transfer ke daerah seiring dengan komitmen pemerintah untuk melaksanakan desentralisasi fiskal.

Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pembangunan Indonesia, pemerintah tidak bisa menjalankannya sendiri. Banyak kerjasama-kerjasama yang dilakukan baik bilateral, multilateral, dan regional. Salah satu kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah adalah melalui kerjasama regional dengan ADB. ADB atau yang dikenal sebagai bank pembangunan yang ada di dalam regional Asia yang memberikan bantuan untuk negara anggotanya khususnya bagi negara-negara berkembang. Kerjasama yang dilakukan oleh ADB dan Indonesia memiliki tujuan untuk membantu pertumbuhan ekonomi pembangunan di Indonesia.

Kerjasama antara ADB dengan Indonesia yang sedang berlangsung sampai saat ini adalah kerangka kerja CPS telah mampu memberikan perubahan terhadap ekonomi pembangunan di Indonesia karena CPS ini diberikan oleh ADB untuk membantu Indonesia dalam mengatasi masalah pembangunan. CPS merupakan kerangka kerja yang terdapat program serta proyek-proyek di setiap sektor yang tercantum di dalamnya dan dilaksanakan pertama kali pada periode 2006-2009 yang dinilai telah membantu memenuhi kebutuhan Indonesia khususnya dalam melancarkan program pemerintah RPJMN 2004-2009. Akan tetapi dalam CPS 2006-2009 ini terdapat kekurangan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya

seperti keterlambatan-keterlambatan pelaksanaan proyek dalam pengadaan barang dan rekrutmen konsultan, dana pendamping yang tidak efisien karena keterlambatan pemberian persetujuan dan pelepasan dokumen-dokumen dan dana anggaran, kompleksitas dalam pentrasferan dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan waktu yang diperlukan untuk membebaskan lahan dan memastikan upaya-upaya perlindungan.

Kerjasama antara ADB dan Indonesia dalam CPS ini berlanjut pada tahun 2012-2014 yang dilatarbelakangi oleh kerangka kerja CPS periode sebelumnya. Seperti kerangka kerja CPS sebelumnya, CPS 2012-2014 ini juga berjalan sesuai dengan RPJMN pemerintah selanjutnya yaitu pada periode 2010-2014. CPS 2012-2014 ini disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan di Indonesia yang selaras dengan strategi pembangunan pemerintah yaitu RPJMN 2010-2014. Dengan dipandu oleh komitmen pemerintah Indonesia dalam pembangunan yang berpihak pada penduduk miskin, pertumbuhan, dan lingkungan. Terdapat dua pilar strategis dalam CPS 2012-2014 yaitu pertumbuhan yang inklusif, dan keberlanjutan lingkungan dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. CPS 2012-2014 memiliki enam sektor utama yaitu: (1) pertanian dan sumber daya alam, (2) pendidikan, (3) energi, (4) keuangan, (5) transportasi, dan (6) pasokan air dan sanitasi.

Pada sektor pertanian dan sumber daya alam program yang terlaksana adalah *Coral Reef Rehabilitation and Management Program Coral Triangel Initiative Project (COREMAP-CTI)* dengan dana sebesar 45,52 Juta USD. Meskipun hanya satu program yang berhasil diimplementasikan, bantuan dari program tersebut dapat memperbaiki sumber daya alam di Indonesia khususnya pada pengelolaan sumber daya pesisir. Sementara untuk sektor pendidikan program yang direncanakan sudah terlaksana karena hanya ada satu program untuk sektor pendidikan yaitu *Polytechnic Education Development Project (PEDP)* yang disetujui pada Oktober 2013 dengan dana OCR sebesar USD 75 Juta dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan politeknik untuk mendukung pengembangan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pengusaha pada perindustrian di Indonesia seperti manufaktur, infrastruktur, pertambangan,

agroindustri, dan pariwisata. Proyek ini juga mendukung reformasi kebijakan utama untuk memperkuat pendidikan politeknik melalui pendekatan terpadu.

Pada sektor energi program yang terlaksana ada dua yaitu *West Kalimantan Power Grid Strengthening* dan *Java-Bali 500-Kilovolt Power Transmission Crossing*. Dalam kerjasama yang dilakukan ADB dengan Indonesia di sektor energi yang terdapat pada kerangka kerja CPS 2012-2014 ini, pemerintah Indonesia menargetkan komisi 500 MW dari kapasitas *geothermal* baru pertahun, tetapi hanya 135 MW dari kapasitas *geothermal* baru yang didapatkan di tahun 2012 dan 2013. Untuk sektor keuangan program yang berhasil tercapai pada sektor ini adalah *Financial Market Development and Integration Program* dengan dana sebesar USD 300 Juta. Dengan kerjasama yang dilakukan ADB dan Indonesia dalam kerangka kerja CPS 2012-2014 ini pencapaian yang didapatkan adalah hasil target pendalaman pasar modal dan meningkatkan sektor tata kelola sebagian besar telah dicapai. *Nonbank financial sector assets* sebagai bagian dari PDB telah mencapai 66,8% pada kuartal pertama tahun 2014 dan hal ini sudah melebihi target CPS yaitu 65%.

Sementara itu, untuk sektor transportasi program yang terlaksana pada sektor transportasi adalah *Inclusive Growth Through Improved Connectivity - Subprogram 1 dan Subprogram 2*. Untuk *Inclusive Growth Through Improved Connectivity - Subprogram 1* dilaksanakan pada tahun 2013, sementara itu *Inclusive Growth Through Improved Connectivity - Subprogram 2* dilaksanakan pada tahun 2014. Peran ADB sebagai bank keuangan internasional telah memberikan pinjaman di sektor transportasi yang secara langsung sangat sesuai dengan strategi pemerintah dalam meningkatkan konektivitas baik intra maupun antar pulau. Untuk pencapaian yang berhasil pada sektor transportasi ini melalui kerjasama ADB dan Indonesia adalah kondisi jalan raya atau *national highway* meningkat pada tahun 2009 sebesar 87% menjadi 93% pada tahun 2014, jumlah rute pelayaran antar pulau meningkat pada tahun 2004 menjadi 80 di tahun 2014.

Pada sektor terakhir yaitu pasokan air dan sanitasi, dua program yang direncanakan berhasil terlaksana yaitu *Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2* dan *Metropolitan Sanitation Management Investment Project*.

Melalui kerjasama yang dilakukan Indonesia dan ADB dalam kerangka kerja CPS 2012-2014 khususnya pada sektor pasokan air dan sanitasi ini diharapkan dapat memberikan hasil yang baik bagi pembangunan di Indonesia. Dapat dilihat bahwa sektor ini menjadi sangat penting bagi kehidupan masyarakat yang semakin meningkat terutama di daerah perkotaan. Dengan peningkatan infrastruktur dan akses ke penyediaan layanan di kawasan-kawasan miskin perkotaan diharapkan dapat mencapai adanya penguatan kapasitas kelembagaan untuk mengelola pembangunan perkotaan yang berpihak pada golongan miskin, serta terbentuknya kemitraan publik swasta untuk mendorong tersedianya permukiman baru bagi keluarga miskin.

Melalui kerjasama regional yang sudah dilakukan ADB dengan Indonesia untuk membantu Indonesia menyelesaikan masalah ekonomi pembangunan yang ada. ADB berperan sebagai lembaga keuangan internasional di kawasan Asia telah menjalankan fungsinya yaitu membuat program-program atau proyek-proyek yang memanfaatkan sumber daya yang ada untuk membiayai pembangunan seperti yang terdapat di dalam kerangka kerja CPS 2012-2014. Selain itu ADB telah memenuhi permintaan pemerintah Indonesia untuk membantu dalam mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan dan rencana pembangunan seperti yang terdapat dalam RPJMN 2010-2014.

Strategi kemitraan negara yang dilakukan Indonesia melalui CPS 2012-2014 ini memberikan pengaruh dan keuntungan untuk pembangunan di Indonesia dengan adanya keselarasan antara CPS dan RPJMN yang telah memberikan kontribusi untuk pembangunan di Indonesia. Dapat dilihat dari enam sektor yang ada pada kerangka kerja CPS sudah memberikan dampak yang baik untuk Indonesia walaupun masih ada program atau proyek yang belum terlaksana di beberapa sektor. Dengan kerjasama yang sudah dilakukan ini diharapkan dapat berkelanjutan dan memberikan dampak yang lebih positif di masa yang akan datang untuk pembangunan di Indonesia.

IV.2. Saran

Kerjasama merupakan suatu hal yang umum dilakukan oleh negara untuk meningkatkan kesejahteraan. Seperti Indonesia yang melakukan kerjasama dengan ADB untuk meningkatkan ekonomi pembangunan di Indonesia. Sering kali kerjasama dianggap sebagai cara untuk mengintervensi negara. Melalui penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran. Pertama, Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya harus bisa memilih mitra kerjasama yang benar-benar dapat dipercaya untuk tidak merusak atau mengambil sumber daya yang ada. Kedua, setiap kerjasama yang dilakukan perhatikan segala bidang atau aspek yang ada misalnya kerjasama pada bida pertanian dan energi, pastikan segala sesuatunya sesuai dengan apa yang sudah ada didalam pakta kerjasama atau MoU yang sudah dibuat. Ketiga, untuk kerjasama yang dilakukan oleh ADB dan Indonesia dalam kerangka kerja CPS seharusnya Indonesia memiliki bukti fisik dari *aide memoire* yang merupakan kesepakatan dari kerangka kerja CPS bukan hanya *loan agreement* untuk program atau proyek yang ada didalam CPS. Keempat, dalam pelaksanaan program atau proyek pemerintah harus melakukan pengawasan yang lebih efektif agar program datau proyek tersebut berjalan sesuai yang diharapkan dan memberikan dampak yang positif untuk ekonomi pembangunan di Indonesia.